

PERSPEKTIF ETIKA KRITIS-LIBERATIF DALAM TEOLOGI PEMBEBASAN ISLAM

Sutikno

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: caksutikno3@gmail.com

Abstract: *This study focuses the construction of liberative and critical ethics in Islamic theology of liberation in the wave of liberal democracy from paradigm of capitalism dan neoliberalism. The practice of liberal democracy in general election and public policy centered to capital that implicate pragmatic, instrumentalist and manipulative political cultures. Those implications rise largest implications of public rights which have to be implemented in public policies. Critical and liberative ethics was qualitative type with library research and uses ideological and theological approaches. The results of this study that practice of liberal democracy in contemporary political life was a structure that rise continuity and change. Critical and liberative ethics have to intervention both agenda of democracy and public policy started in planning untill action. The process of political education based on critical and liberative ethics have to be actualized by each actor and political institution untill make balance between people and state relations. Critical and liberative ethics have tobe a foundation of discourse in public sphere communications of public sphere which to appreciates principles of egalitarianism and populism untill make a social change in society.*

Keywords: *Liberative-critical ethics, liberation theology.*

Pendahuluan

Diskursus mengenai hubungan antara Islam dan politik mewarnai proses konstruksi pemikiran politik Islam di Indonesia selama beberapa dekade. Hal ini didasarkan bahwa hubungan antara Islam dan politik telah terjadi selama beberapa abad sejak penyebaran Islam itu sendiri di kawasan nusantara. Dalam penyebaran Islam, dimensi politik baik secara implisit maupun eksplisit mempengaruhi proses penyebaran Islam.¹ Demikian sebaliknya, proses kehidupan politik sejak era kerajaan hingga lahirnya republik tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Islam. Hubungan tersebut meniscayakan adanya agen dan agensi berupa aktor-aktor dari kalangan Islam di mana secara historis didominasi ulama yang terlibat, baik pasif maupun aktif ke dalam politik.² Proses konstruksi pemikiran di atas lahir dari konseptualisasi atau teoritisasi

¹Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara* (Bandung: Mizan, 2002), 18.

²Peran kaum ulama dalam penyebaran Islam di Nusantara merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan meski kerap kali dijadikan sebagai legitimasi tentang keterlibatan mereka dalam kehidupan politik kontemporer. Hal ini logis mengingat landasan politik kaum ulama tidak bisa direduksi secara pragmatis namun etis dan normatif. Dengan kata lain, keharusan menegakan kebajikan dan mencegah kemungkaran merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang harus diperjuangkan melalui kehidupan

dari fenomena dan fakta politik yang terjadi selama beberapa abad sehingga melahirkan apa yang disebut tradisi politik Islam. Tradisi politik Islam tersebut merupakan integrasi antara konsepsi dan teori dengan praktek politik yang harus dijalankan. Dengan tradisi tersebut maka dapat difungsikan sebagai landasan legitimasi bagi proses politik.

Dalam tradisi politik Islam di Indonesia, hubungan antara Islam dan politik memosisikan ideologi sebagai unsur atau aspek penting yang mendasari proses pengumpulan antar keduanya yang mencapai puncaknya pada masa orde lama hingga sekarang. Kehadiran demokrasi sebagai ideologi dan sistem politik memberikan ruang dan kebebasan bagi masyarakat Indonesia untuk mengartikulasikan berbagai perspektif ideologis yang mendasari. Meski demikian, kebebasan dan kemerdekaan atas nama demokrasi di atas tidak bisa dijalankan secara liberalistik sehingga bertentangan dengan konstitusi. Di Indonesia, demokrasi sejak kelahirannya merupakan sarana artikulasi politik yang secara ideal telah mencerminkan prinsip-prinsip kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan konstitusi, yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Kehadiran demokrasi sebagai sistem dan ideologi dalam politik nasional di atas memperlihatkan pasang surut selama tiga periode kepemimpinan nasional.³ Di era orde lama, terjadi penerapan sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin sehingga proses artikulasi politik, khususnya di kalangan Islam, berjalan tidak maksimal. Namun artikulasi politik di kalangan Islam sendiri tidak bersifat monolitik namun pluralis. Di kalangan Islam sendiri terdapat berbagai kekuatan politik yang muncul sejak periode Sukarno hingga pasca orde baru. Namun demikian, respon sebagian kalangan Islam terhadap demokrasi tidak selamanya bersifat kompromistik, namun juga konfrontatif. Di era Sukarno, sikap konfrontatif terhadap demokrasi didasarkan argumentasi bahwa demokrasi merupakan ideologi politik Barat yang tidak ditemukan dalam ajaran Islam.⁴ Pandangan dan sikap konfrontatif ini dalam proses sejarah politik pada akhirnya hilang dari konstruksi pemikiran politik Islam Indonesia.

Sikap otoritarian Sukarno di era demokrasi terpimpin terhadap kekuatan politik Islam yang disebut dengan Islam formalis menentukan masa depan politik sebagian umat Islam sendiri. Sikap Sukarno di atas dilatarbelakangi munculnya berbagai pemberontakan yang mengatas-namakan Islam sehingga menjadi ancaman bagi struktur kekuasaan Sukarno. Sikap Sukarno ini berlanjut di era Orde Baru di mana Suharto melakukan kebijakan penyederhanaan partai politik yang sebelumnya berjumlah 48 partai politik agar melakukan fusi sehingga tinggal menjadi tiga partai politik (Golkar, PPP dan PDI).⁵ Kecurigaan yang berakibat pada marginalisasi politik Islam di atas

politik. Lebih jauh, lihat, Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2008)., Muhammad Iqbal, "Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam di Nusantara", dalam *Jurnal Islamica*, No. 1. Vol. 6. 2011, 51-65.

³Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2007), 38-99., Martua PB, *Hedonisme Arus Balik Demokrasi* (Jakarta: PWI, 2015), 13.

⁴Di antara figur Islam yang konfrontatif dengan demokrasi adalah Muhammad Natsir. Meski demikian, figur ini justru mengembangkan konsep demokrasi sendiri yang secara substansial tidak bertentangan dengan demokrasi Barat. Muhammad Natsir membangun apa yang disebut demokrasi teistik yang mendasarkan pada musyawarah (*syura*). Lihat, Anwar Haryono, *Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 58.

⁵Kebijakan deparpolisasi secara konotatif diarahkan pada kalangan Islam khususnya kekuatan politik Islam Orde Lama yang oleh rezim Orde Baru masih dinilai menyimpan potensi politik untuk menegakan negara Islam. Di luar kebijakan tersebut, muncul gerakan pembaruan pemikiran Islam yang

dilatarbelakangi oleh pluralisme pemikiran di kalangan Islam sehingga memperlihatkan ambivalensi dan ambiguitas tentang Islam dan demokrasi itu sendiri. Praktek politik Orde Baru di atas juga memperlihatkan deparpolisasi kalangan Islam yang berakibat lahirnya deideologisasi Islam ke dalam politik.

Kebijakan deideologisasi politik umat Islam, di samping terhadap kaum nasionalis dan komunis, oleh Orde Baru di atas memperlihatkan kesamaan momentum di tingkat global pasca runtuhnya komunisme dan sosialisme di Eropa Timur. Pandangan Fukuyama tentang kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal pasca runtuhnya Uni Soviet sebagai negara sosialis dan komunis akan menjadi kekuatan ideologis global yang mempengaruhi proses politik nasional di berbagai negara.⁶ Namun pandangan Fukuyama tentang akhir ideologi, di samping Bell tentang kematian ideologi,⁷ justru berbeda secara diametral dengan Huntington. Menurut Huntington, meski Barat telah memperoleh kemenangan di balik runtuhnya komunisme dan sosialisme namun akan menghadapi Islamisme sebagai lawan dan bahkan musuh baru.⁸ Islamisme merupakan ideologi sebagian kecil kalangan Islam dengan mengatasnamakan Islam yang di dalamnya memuat doktrin dan ajaran tentang negara Islam yang dikenal dengan khilafah Islam.⁹

Kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal oleh Huntington di atas menemukan momentumnya dalam politik nasional Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Kelahiran reformasi tahun 1998 ditandai dengan tuntutan demokratis yang lebih terbuka namun justru mengarah pada praktek liberalisme politik atau demokrasi liberal. Di kalangan Islam, polarisasi ideologis yang sebelumnya tampak kemudian memperlihatkan pencairan sedemikian rupa. Di masa awal reformasi, fenomena munculnya kekuatan Islam politik yang disandarkan pada beberapa partai politik dan organisasi massa telah mengalami pencairan.¹⁰ Apa yang disebut pencairan ini merupakan indikasi akhir ideologi yang ditegaskan Fukuyama meski sebatas di tingkat nasional. Fenomena pencairan tersebut dibuktikan dengan budaya kompromi ideologis di balik pemikiran dan praktek politik antar kekuatan politik di Indonesia pasca Orde Baru. Fenomena tersebut juga dibuktikan oleh fenomena pergeseran ideologis dari yang idealis menuju yang pragmatis sekaligus realis.

Meski demikian, pergeseran dari idealisme menuju realisme dan pragmatisme pada prinsipnya tidak terjadi di wilayah doktrin dan ajaran suatu ideologi. Hal ini didasarkan bahwa suatu ideologi yang meski bercorak utopis sekalipun sesungguhnya memuat prinsip-prinsip ideal yang harus diwujudkan. Di samping itu, pergeseran dari

secara implisit membangun konvergensi politik dan demokrasi antara Islam dengan Orde Baru. Lebih jauh, lihat, M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995).

⁶Francis Fukuyama, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, terj. M. Husein Amrullah (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 1992), 15.

⁷Daniel Bell, *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in Fifties* (New York: The Free Press, 1960), 13-18.

⁸Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. ter. Sadat Ismail (Jakarta: Qalam, 2001), lx.

⁹Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme* (Bandung: Mizan, 2016), 1.

¹⁰Menurut John Schwarzmantel, pencairan ideologis di era kontemporer tidak saja sebagai wujud sikap inklusif masyarakat namun juga sebagai akibat dari fragmentasi masyarakat itu sendiri. Pandangan ini merujuk pada Giddens dan Bauman. Lihat, John Schwarzmantel, *Ideology and Politics* (London: Sage Publications, 2008), 22.

idealisme ke realisme dan pragmatisme dimungkinkan juga terjadi di wilayah praksis. Sebab manifestasi doktrin dan ajaran suatu ideologi memang memerlukan ragam pendekatan dengan tetap konsisten mewujudkan prinsip-prinsip ideal tersebut. Manifestasi ideologi merupakan proses dan langkah mewujudkan prinsip-prinsip doktrinal ideologis yang meniscayakan proses dialektis dengan berbagai kekuatan ideologi lain.

Pergeseran ideologis dari idealis ke realis dan pragmatis dalam praktek politik Indonesia kontemporer merupakan fenomena yang ditimbulkan oleh struktur neoliberalisme atau demokrasi liberal pasca Orde Baru. Keharusan memenuhi tuntutan demokratis yang lebih transparan dan bertanggung-jawab dalam dimensi politik dan pemerintahan merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Fenomena neoliberalisme politik dalam demokrasi liberal di atas juga menjadi kecenderungan global. Pada masa awal reformasi, keharusan demokratisasi bernuansa liberalistik di atas merupakan paket utama menuju globalisasi dan liberalisasi politik dan ekonomi. Intervensi berbagai lembaga internasional untuk menawarkan proyek demokratisasi dengan melibatkan berbagai organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations*) merupakan realitas yang tidak bisa dihindari. Meski demikian, di balik proyek-proyek demokratis yang dijalankan ternyata menenggelamkan daya kritis sebagian organisasi non-pemerintah tentang jebakan neoliberalisme yang justru meruntuhkan masa depan kedaulatan rakyat itu sendiri.¹¹

Jebakan neoliberalisme (*neoliberalism traps*) di kalangan organisasi non-pemerintah juga tidak berbeda dengan organisasi struktural, yakni lembaga-lembaga pemerintahan. Keharusan globalisasi dan liberalisasi politik-ekonomi tersebut menuntut pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program penyesuaian struktural yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Program tersebut merupakan alternatif di saat Indonesia menghadapi krisis yang mengakibatkan runtuhnya Orde Baru serta sebagai paket yang terus berlangsung di era kapitalisme global ini. Di wilayah politik, jebakan neoliberalisme berikut praktek demokrasi liberal di samping mendasari paket kebijakan politik khususnya agenda demokrasi berupa pemilu dan pemilukada juga memuat unsur-unsur budaya politik (*political culture*) berupa nilai-nilai yang mendasari sebagian besar aktor politik atau politisi baik nasional maupun lokal.¹² Lahirnya kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi pemerintahan tidak saja mencakup sektor ekonomi tentang perimbangan keuangan namun juga sektor politik berupa kebijakan pemilu kepala daerah secara langsung.

Pergeseran budaya demokrasi ke arah liberalistik di atas melahirkan sirkulasi kekuasaan baik nasional maupun lokal yang berpijak pada modal. Perjalanan proses sirkulasi kekuasaan dan modal dalam agenda pemilu dan pemilukada menimbulkan dampak serius berupa praktek korupsi dan manipulasi politik terutama anggaran pembangunan bagi masyarakat sebagai simbolitas kedaulatan rakyat. Hubungan antara modal dan kuasa di balik sirkulasi diatas dalam jebakan neoliberalisme mempertegas

¹¹Bob Sugeng Hadiwinata, "Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 1. Vol. 9. Tahun 2005, 1-7. Aditya Perdana, "Civil Society dan Partai Politik dalam Demokratisasi di Indonesia", Makalah pada Seminar Internasional ke-10 oleh Yayasan Percik-Salatiga pada 30 Juli 2009.

¹²Vedi R. Hadiz, *Localizing Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* (Stanford: Stanford University Press, 2010), 26.

bahwa politik identik dengan ekonomi.¹³ Dengan kata lain, lahirnya pasar politik dalam demokrasi liberal dibuktikan dengan agenda pemilu dan pemilukada berikut praktek politik uang sehingga mendasari elit politik terpilih melakukan politik pengembalian modal (*capital returning based politics*). Munculnya praktek korupsi dan manipulasi kekuasaan sebagai problem besar di bidang hukum dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena di atas.

Pergeseran ideologis dari yang idealis menuju realis dan pragmatis berikut problem yang ditimbulkan merupakan problem serius dalam politik Indonesia kontemporer baik di tingkat nasional maupun lokal. Pergeseran ideologis dalam jebakan neoliberalisme dan demokrasi liberal di samping meruntuhkan dimensi nalar dan kesadaran ideologis juga menimbulkan fenomena anti fondasionalisme. Krisis anti fondasionalisme dalam politik Indonesia kontemporer ditandai dengan kuantitas kapital sebagai landasan baru dalam pemikiran dan praktek politik. Krisis tersebut sengaja mengubur makna dan peran ide atau gagasan sehingga semakin memperlihatkan bahwa praktek politik di Indonesia kontemporer bukan sebagai pergulatan ide dan gagasan serta proyeksi kebangsaan namun tidak lebih sebagai sirkulasi politik modal di mana struktur pemerintahan hanya menjadi sarana dan modus produksi demi pencapaian kuantitas modal secara maksimal.

Padahal ditinjau secara kritis, institusi kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif sejauh ini masih didominasi oleh elit-elit berlatar-belakang Islam. Latarbelakang Islam tersebut dapat difahami secara ideologis maupun teologis. Meski terjadi pergeseran ideologis yang bersifat realis dan pragmatis namun tidak bisa mengabaikan pergeseran teologis. Dengan kata lain, dimensi Islam dalam struktur kekuasaan dinilai masih menyisahkan kesadaran teologis baik secara simbolik maupun substantif. Aspek teologis dalam Islam tidak sekedar sebagai konstruksi keyakinan dan kepercayaan metafisik kepada Tuhan, namun juga memuat dimensi moral dan etis di balik fungsi dan peran struktural maupun politik yang harus dijalankan.

Dari penegasan di atas maka tulisan ini memfokuskan pada bagaimana konstruksi etika kritis teologi pembebasan dalam praktek kehidupan demokratis politik pasca Orde Baru. Konstruksi lahir dari dialektika antara teks dengan konteks, yakni antara doktrin dan ajaran teologis dengan fenomena dan realitas yang meruanglingkupi. Dalam pemikiran Islam, teologi pembebasan dalam Islam (*theology of liberation in Islam*) merupakan wacana kontemporer yang lahir dari berbagai tuntutan keterlibatan nilai-nilai Islam atas problem kontemporer. Praktek liberalisme politik dalam struktur kekuasaan dewasa ini menyimpan berbagai problem politik dan ekonomi berupa hegemoni dan eksploitasi atas hak dan kedaulatan masyarakat. Di samping itu, konstruksi dari dialektika teks dan konteks merupakan upaya pembumian nilai-nilai Islam sehingga mempertegas bahwa Islam tidak sekedar sebagai agama langit namun juga menentukan proses perjalanan politik yang berada di bumi.

Konstruksi etika kritis dalam teologi pembebasan merupakan tipe kajian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan yang digunakan kajian ini adalah teologis dan ideologis yang didasarkan bahwa pergeseran ideologis dalam politik Islam tidak bisa dilepaskan dari dominasi kapitalisme global berupa praktek liberalisme politik yang terjadi di Indonesia.

¹³David Levine dan James A. Caporaso, *Teori-teori Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) khususnya Bab 3.

Kemajuan kapitalisme dan liberalisme politik tersebut melahirkan struktur-struktur politik yang menjangkau sampai ke tingkat lokal, yakni daerah-daerah di Indonesia. Sebagai kajian teoritik dengan metode kepustakaan, kajian ini berorientasi bagaimana membangun konstruksi teologi pembebasan dalam Islam Indonesia sebagai keniscayaan pergeseran ideologis di atas. Konstruksi teologis sebagai hasil kajian ini lahir setelah proses dialektis terhadap struktur atau realitas yang meruanglingkupi.

A. Konsep Teologi Pembebasan dan Neoliberalisme Politik

Teologi merupakan dimensi utama dalam Agama-agama yang dewasa ini menjadi landasan atau dasar dalam mempertanyakan secara kritis berbagai problem kemanusiaan kontemporer. Secara sederhana, teologi diartikan sebagai ilmu tentang ketuhanan. Menurut Drewes dan Mojau, istilah teologi berasal dari kata Yunani, yaitu *theos* artinya Allah atau ilah dan *logos* artinya perkataan atau firman dan atau wacana. Dengan demikian, teologi merupakan wacana ilmiah mengenai Allah atau ilah.¹⁴ Dalam Islam, wacana atau diskursus tentang teologi tidak saja menyangkut dimensi ketuhanan yang bersifat metafisik namun juga etis. Menurut Nasution, kelahiran teologi dalam Islam berkaitan erat dengan persoalan politik yang muncul sepeninggal nabi Muhammad. Persoalan tentang siapa pengganti nabi merupakan akar masalah yang mencapai puncaknya pada era Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib berikut peristiwa yang meruanglingkupi.¹⁵

Dalam periode awal Islam, istilah teologi lebih dikenal sebagai ilmu kalam yang memfokuskan pembahasan tentang ketuhanan melalui wahyu, yakni al-Qur`an dan as-Sunnah. Dalam perkembangannya, fokus pembahasan teologi mengalami perubahan dari masalah ketuhanan yang bersifat teosentrisme kemudian berubah menjadi pembahasan tentang kemanusiaan atau antroposentrisme. Perubahan tersebut merupakan tuntutan di tengah kehidupan modern yang di samping menimbulkan dampak positif juga negatif. Menurut Muhammad Arkoun, teologi mestinya tidak hanya sebatas bergerak secara vertikal yang bercorak normatif, doktrinal dan religius. Lebih jauh, teologi juga harus bergerak secara horisontal yang bercorak historis, empiris dan sosiologis.¹⁶ Apa yang ditegaskan Arkoun tersebut sejauh ini memperlihatkan realitas menarik dengan lahirnya teologi-teologi baru dalam tradisi pemikiran Islam.

Teologi pembebasan merupakan jenis teologi yang dapat dianggap baru dalam tradisi pemikiran Islam. Kelahiran teologi pembebasan dalam Islam di samping memperlihatkan fenomena hampir sama sebagaimana teologi serupa dalam tradisi Kristen juga dilatarbelakangi oleh problem yang hampir sama pula.¹⁷ Dalam Islam,

¹⁴B.F. Drewes dan Julianus Mojau, *Apa Itu Teologi?: Pengantar Ke Dalam Ilmu Teologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 16.

¹⁵Harun Nasution, *Teologi Islam: Sejarah, Aliran-aliran dan Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 2006), 6.

¹⁶Hashem Shaleh, "Metode Kritik Akal Islam: Wawancara Dengan Muhammad Arkoun", dalam *Jurnal Ulumul Qur`an*, No. 5, tahun 1994, 163.

¹⁷Dalam tradisi Kristen, Gustavo Guterrez dianggap sebagai pencetus teologi pembebasan (*theology of liberation*). Kehadiran teologi pembebasan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor ideologis, khususnya hegemoni dan dominasi eksploitatif kapitalisme dan liberalisme di berbagai kawasan, khususnya Amerika-Latin. Kapitalisme dan liberalisme merupakan ideologi Barat yang dijalankan melalui sistem ekonomi dan politik berikut kekuatan militer untuk menindas masyarakat dunia ketiga. Upaya pencarian legitimasi teologis sebagai landasan perlawanan terhadap kapitalisme dan liberalisme tersebut dengan sendirinya memperlihatkan tuntutan kaum Katolik atas doktrin dan ajarannya yang

diskursus teologi pembebasan dipresentasikan oleh beberapa pemikir muslim yang sejauh ini konsisten di bidang tersebut. Di antara pemikir tersebut adalah Asghar Ali Engineer yang mengangkat tema teologi pembebasan dalam Islam sebagai bentuk respon kritis terhadap eksploitasi, dominasi dan hegemoni kapitalisme dan liberalisme di masyarakat muslim.¹⁸

Menurut Engineer, konsep teologi pembebasan tetap mengacu pada pijakan normatif dalam kitab suci dan sekaligus sebagai bentuk kritik terhadap teologi Islam dogmatis. Kelemahan mendasar teologi dogmatis mencakup eksposisi kitab suci yang difahami secara tekstual dan normatif. Sementara dalam teologi pembebasan, orientasi nilai-nilai revolusioner dalam kitab suci menjadi langkah penting bagi lahirnya manifestasi dan gerak perubahan di kalangan masyarakat muslim. Terdapat tiga landasan utama yang mendasari proyek tersebut. *Pertama*, teologi Islam yang selama ini berkembang di masyarakat telah kehilangan relevansinya dengan konteks sosial yang ada, padahal teologi Islam tersebut mestinya bersifat kontekstual dan transendental. *Kedua*, teologi itu akan mengalami *demistified* dari apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Islam. *Ketiga*, mengembalikan seperti semula komitmen Islam terhadap terciptanya keadilan sosial ekonomi terhadap kaum tertindas.¹⁹

Kehadiran Farid Esack, di samping Engineer, dalam diskursus teologi pembebasan semakin memperkuat tradisi pemikiran Islam kontemporer. Figur Farid Esack tidak saja sebagai pemikir muslim berhaluan progresif namun juga terlibat aktif dalam perjuangan masyarakat Afrika-Selatan berhadapan dengan rezim Apartheid beberapa tahun silam. Teologi pembebasan Esack ini dibangun dari metodologi hermeneutika dalam penafsiran al-Qur'an yang dikenal kemudian dengan hermeneutika pembebasan.²⁰ Lebih jauh, kehadiran gerakan feminisme dalam Islam beberapa waktu terakhir juga tidak bisa dilepaskan dari paradigma teologis pembebasan. Dengan demikian, paradigma teologi pembebasan dalam Islam yang dikonstruksi oleh beberapa

selama ini lebih bersifat metafisik dan teosentris daripada etis dan antroposentris. Lihat, Christos Yanaras, "A Note on Political Theology", dalam *St Vladimir's Theology Quarterly*, No. 27. Vol. 1, 1983, 53-56., Timothy Fitzgerald, *The Ideology of Religious Studies* (New York: Oxford University Press, 2000), 1., McEfee Brown, *Gustavo Guitierrez: An Introduction to Liberation Theology* (New York: Orbis Books, 1990), 20., Gustavo Guitierrez, *A Theology of Liberation: History, Politics and Salvation* (New York: Orbis Books, 1988), 63.

¹⁸Dalam karyanya, Engineer membahas 18 topik yang dewasa ini menjadi problem di kawasan dunia Islam melalui perspektif teologi pembebasan yang digagasnya. Topik-topik tersebut memang secara impresif bersifat kasuistik namun secara garis besar ditarik kesimpulan bahwa setiap topik didekati dengan perspektif teologis yang dikembangkannya. Satu dari beberapa topik tersebut menjabarkan posisi Muhammad yang tidak saja sebagai nabi dalam perspektif teologis klasik namun juga dalam perspektif sosial dan politik. Istilah Muhammad sang Pembebas menegaskan peran dan fungsi Nabi sebagai pembela kaum tertindas (*the Oppressed*), suatu istilah yang mempunyai kesamaan dalam perspektif Marxian ketika menjabarkan tentang *mode of production* yang melibatkan kaum buruh pada satu sisi dan borjuis pada sisi lain. Meski demikian, konsep profetik dalam peran Nabi dengan emansipatoris dalam diri Marx tentu tidak bisa digeneralisasi secara mutlak. Sebab bagaimanapun, konsepsi emansipatoris dalam tradisi Marxian menggambarkan kecenderungan ideologis yang demikian kuat. Dengan kata lain, gagasan kediktatoran proletariat (*dictatorship of the Proletariat*) dalam tradisi Marxian lebih bernuansa ideologis ketimbang profetik sebagaimana nampak dalam peran Nabi Muhammad. Lihat, Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung P. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Iswahyudi, "Nalar Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer," dalam Wasid,dkk, *Menafsirkan Tradisi dan Modernitas: Ide-ide Pembaruan Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2011), 339.

¹⁹Ibid, xl.

²⁰Massimo Campanini, *The Qur'an: The Basics* (London and New York: Routledge, 2016), 129.

pemikir muslim kontemporer mencakup berbagai aspek dan sektor di mana secara keseluruhan dilatarbelakangi oleh fenomena dan realitas berupa eksploitasi dan hegemoni ideologis kapitalisme dan liberalisme.

Meski demikian, konstruksi paradigma teologis pembebasan oleh beberapa pemikir muslim kontemporer memperlihatkan konteks yang berbeda sesuai dengan perbedaan ruang dan model eksploitasi ideologis yang dihadapi. Dengan kata lain, jika eksploitasi, dominasi dan hegemoni merupakan konsep umum maka diperlukan identifikasi tentang jenis dan obyek dari tindakan tersebut. Eksploitasi perempuan yang mendasari teologi pembebasan sehingga melahirkan gerakan feminisme yang meski mengandung semangat sama namun memerlukan argumentasi berikut struktur paradigma yang berbeda dengan eksploitasi di bidang lain. Dari sini tampak bahwa teologi pembebasan memuat dan mengandung jangkauan luas sehingga menuntut kontekstualisasi secara luas pula.

Dari pembahasan konsepsi teologi dan teologi pembebasan di atas maka diperlukan penajaman tentang problem ideologis yang meruanglingkupi. Menurut sebagian kalangan, ideologi merupakan suatu konsep yang membingungkan, abstrak dan juga feyoratif.²¹ Secara historis, ideologi kerap kali dipersandingkan dengan ilmu pengetahuan di mana antar keduanya terjadi konflik menyangkut apa yang disebut sebagai standar obyektifitas dan subyektifitas. Dalam hubungan antar keduanya, ideologi dituduh sebagai suatu gagasan atau ide tentang protes dan perlawanan atas kemampuan ilmu pengetahuan yang mendasari praktek dan perilaku individu. Dalam tradisi filsafat kritis, kecurigaan dan kesangsian ideologi terhadap kebenaran ilmu pengetahuan dilatarbelakangi oleh pergeseran misi pencerahan yang dicita-citakan sejak awal. Jika ideologi merupakan istilah feyoratif akibat kesangsian dan kecurigaan, maka bagi kaum ideolog, sikap feyoratif kaum ilmuwan juga mengarah pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Apa yang disebut sebagai pertautan pengetahuan dan kepentingan merupakan keniscayaan di balik sikap kesangsian dan kecurigaan ideologis.²²

Kehadiran teologi pembebasan oleh sebagian pemikir muslim kontemporer dapat dinilai sebagai sikap feyoratif karena mempersoalkan kebenaran ilmiah yang mendasari praktek kapitalisme dan liberalisme baik di bidang politik maupun ekonomi. Namun terlepas tuduhan atau justifikasi feyoratif tersebut, dampak yang ditimbulkan oleh kapitalisme dan liberalisme secara obyektif menuntut respon kritis dan bahkan dekonstruktif. Tindakan dekonstruktif dan kritis merupakan langkah penting di tengah pergeseran orientasi ideologis kapitalisme dan liberalisme yang tidak sesuai dan bahkan menyimpang dari cita-cita pencerahan. Secara historis, perlawanan terhadap kapitalisme dan liberalisme secara ideologis terjadi sejak awal hingga pertengahan abad ke-20. Perlawanan tersebut di samping dari sosialisme dan komunisme juga gerakan-gerakan ideologis lain. Dari perlawanan tersebut, hanya sosialisme dan komunisme yang dapat masuk ke jantung persoalan ideologis meski kritik ideologis yang dilancarkan memperlihatkan kegagalan di Uni Soviet dan akhirnya runtuh di akhir abad ke-20.

Diskursus tentang neoliberalisme kontemporer dewasa ini menjadi tema sentral yang direspon beragam oleh masyarakat. Di satu sisi, diskursus tersebut mengarah pada sikap apresiatif dan bahkan paganistik tentang kemajuan dan kesejahteraan yang

²¹Roger Eatwell "Ideologies: Approaches and Trends" dalam Roger Eatwell dan Anthony Wright, *Contemporary Political Ideologies* (London: Pinter Publishers, 1994), 2-4.

²²F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Menurut Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 7.

dijanjikan dan ditawarkan. Diskursus tentang neoliberalisme secara ideologis tidak bisa mengabaikan aspek historis dan genealogis. Ideologi neoliberalisme merupakan kelanjutan dan keberlangsungan kapitalisme dan liberalisme klasik yang memperlihatkan wajah baru melalui praktek demokrasi liberal dalam bidang politik dan ekonomi. Meski memperlihatkan wajah baru namun sesungguhnya tidak bisa menyembunyikan watak predatoristik, eksploitatif, dominatif dan hegemonik.²³ Beberapa watak neoliberalisme dalam praktek demokrasi liberal hanya bisa digambarkan dengan menggunakan perspektif Marxis maupun Neo-marxis yang sejak awal mematahkan argumentasi kapitalisme dan liberalisme klasik. Menurut Engineer, perspektif Marxis dan Neo-marxis ini menjadi perangkat penting sebelum menawarkan pendekatan teologis pembebasan Islam sebagai solusi.²⁴

Sebagaimana kapitalisme yang berpusat pada liberalisme, ideologi neoliberalisme memuat konstruksi ide atau gagasan yang secara substansial tidak berbeda dengan liberalisme klasik. Dalam liberalisme klasik, kebebasan dan kemerdekaan merupakan kunci utama yang mendasari setiap individu atau manusia menjalankan praktek ekonomi. Dalam neoliberalisme, terdapat perubahan normatif di mana kebebasan dan kemerdekaan yang dalam liberalisme klasik berorientasi individual kemudian berubah ke arah kebebasan dan kemerdekaan kolektif. Perubahan prinsip ideologis liberalisme klasik ke arah neoliberalisme tampak dari pandangan Mills dan Macpherson. Menurut Mills, kebebasan dan kemerdekaan dalam liberalisme klasik memang tidak bisa lepas dari fenomena penindasan keras oleh yang kuat kepada yang lemah. Namun hal ini berbeda dengan neoliberalisme di mana penindasan tersebut dilakukan secara sistematis yang berpijak dari ide-ide kreatif yang mencapai puncaknya di era kontemporer.²⁵

Di era kontemporer, eksploitasi dan hegemoni lunak oleh neoliberalisme mengalami ekspansi ke berbagai sektor kehidupan manusia yang tidak sebatas di wilayah ekonomi dan politik.²⁶ Praktek hegemoni dan eksploitasi di atas memaksimalkan pendekatan komodifikasi terhadap berbagai unsur yang terdapat dalam intensionalitas masyarakat. Menurut Wingo, di antara komodifikasi tersebut menyangkut nilai-nilai sejarah sebagaimana tampak dari praktek politik kaum neoliberalis di Amerika-Serikat. Nilai-nilai sejarah tersebut, lanjut Wingo, dikomodifikasi dan dimanipulasi sedemikian rupa melalui struktur narasi sehingga dapat mempersuasi masyarakat luas. Padahal tindakan di atas tidak lebih sebagai kejahatan politik di mana narasi nilai-nilai historis tidak berbanding linear dengan fakta yang dihasilkan.²⁷

Pandangan Wingo tentang komodifikasi dan manipulasi di atas menampakan momentumnya di tengah arus dominasi media massa yang di samping sebagai

²³Dalam pandangan Fukuyama, kemenangan neoliberalisme berpijak dari kunci utama berupa fleksibilitas operasional yang mendasari praktek hegemoni dan dominasi. Fleksibilitas tersebut merupakan kunci utama dalam mengaburkan berbagai kecurigaan dan sikap kritis oleh negara maupun masyarakat. Lihat, Francis Fukuyama "The End of History", dalam *The National Interest*, Vol. 16, 1989, 3., Irving Kristol, ed, *Memotret Kanan Baru* Terj. Wahyudin. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001), 49.

²⁴Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

²⁵C.B. Macpherson, *The Life and Times Liberal Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 1979), 1.

²⁶Bryan S. Turner, ed, *The Routledge Handbook of Globalization Studies* (New York: Routledge, 2010), 622-634.

²⁷Ibid.

simbolitas globalisasi juga sebagai sarana konstruksi citra dalam praktek politik baik secara struktural maupun kultural. Di Indonesia, fungsi dan peran media massa merupakan bagian dari proses demokratisasi yang telah dimulai sejak lahirnya pemerintahan reformasi pasca orde baru tahun 1998 lalu. Dalam agenda demokratisasi di atas, kebijakan desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah dinilai paling signifikan. Hal ini didasarkan bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan relasi antara rakyat dan negara yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kotamadia. Institusi media massa dan organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations*) merupakan bagian dari aktor-aktor demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal.

B. Dimensi Etika dalam Teologi Pembebasan

Teologi pembebasan dalam Islam, sebagaimana teologi dalam tradisi agama-agama lain, merupakan perwujudan atau manifestasi nilai-nilai dari yang metafisik – teosentris menuju etis – antroposentris. Teologi yang bercorak etis – antroposentris tersebut merupakan pembumian nilai-nilai Islam yang harus bersinggungan dengan kehidupan masyarakat secara langsung. Teologi bercorak etis bukan merupakan entitas diametral dengan teologi bercorak metafisik. Dalam Islam, terdapat berbagai penegasan Tuhan dalam kitab suci (al-Qur`an) dan Sunnah nabi Muhammad sebagai sumber doktrin dan ajaran Islam yang bersifat mutlak. Dalam dua sumber doktrin dan ajaran Islam di atas ditegaskan bahwa Tuhan mengutus nabi Muhammad dengan al-Qur`an sebagai sumber doktrin dan ajaran adalah sebagai rahmat semesta alam. Konsep rahmat dalam Islam merupakan cermin dimensi etika dan moralitas Islam yang banyak ditegaskan dalam al-Qur`an dan Sunnah nabi Muhammad.

Dimensi etika dan moralitas dalam Islam di samping tertulis dalam teks kitab suci dan tradisi kenabian juga melandasi pemikiran sebagian filosof dan ulama Islam sejak masa klasik hingga modern. Dimensi etika dan moralitas di atas memuat prinsip-prinsip dan nilai-nilai suatu tindakan baik laten maupun tampak. Bentuk tindakan laten dan tampak ini mempertegas bahwa dimensi etika dan moralitas dalam Islam di samping mengarah pada fakta tindakan juga fenomena dan noumena di balik tindakan. Dalam Islam, baik filosof maupun ulama menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari dua bentuk tindakan tersebut sesuai dengan perspektif yang mendasari.²⁸ Politik merupakan aspek kehidupan manusia yang tidak bisa dilepaskan dari jangkauan moralitas dan etika di atas. Meski demikian, aspek politik dalam Islam sejauh ini justru memperlihatkan reduksi dan fragmentasi sebagai bidang kehidupan masyarakat muslim yang bernaung dalam payung fikih Islam, yakni fikih Siyasah. Eksistensi politik atau fikih Siyasah ke dalam bidang jurisprudensi Islam dengan sendirinya mereduksi dan membatasi jangkauan bidang etika politik yang hanya sebatas di wilayah tersebut. Padahal etika khususnya etika politik dalam Islam tidak hanya sebagai bidang fikih semata. Lebih jauh, etika politik dalam Islam secara dominan justru bersinggungan dengan bidang filsafat etika dan tasawuf.

Kemunculan ideologi-ideologi politik kontemporer dewasa ini merupakan tantangan besar bagi teologi Islam yang bercorak etis. Hal ini didasarkan bahwa

²⁸Ibn Taimiyah misalnya merupakan salah satu ulama yang punya perhatian besar terhadap etika politik melalui pendekatan fikih. Lihat, Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*. terj. Anas M (Bandung: Pustaka, 1983).

kehadiran beberapa ideologi besar seperti sosialisme-komunisme, kapitalisme dan liberalisme serta neoliberalisme kontemporer sebagai evolusi kapitalisme dan liberalisme tersebut belum pernah muncul di abad pertengahan Islam. Penetrasi kapitalisme dan neoliberalisme kontemporer sejalan dengan kemajuan globalisasi yang sejak awal sebagai terompet ideologis memperlihatkan praktek demokratis politik bercorak liberalistik. Demokrasi liberal baik dalam agenda politik formal, khususnya agenda-agenda demokrasi, maupun kebijakan publik diwarnai budaya politik yang berorientasi pada pasar. Fenomena tersebut mencapai puncaknya sejalan dengan kebijakan desentralisasi pemerintahan yang disebut pula dengan otonomi daerah.

Di era otonomi daerah sejak tahun 2001, terdapat optimisme dan kekhawatiran sebagian kalangan menyangkut pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di satu sisi dan praktek korupsi dan manipulasi kekuasaan di sisi lain. Lahirnya kebijakan pemilukada langsung sejak tahun 2005 semakin mempertegas bahwa peran pasar politik (*political markets*) demikian dominan. Dalam agenda demokrasi tersebut, dimensi ideologis politik tidak menjadi pertimbangan utama. Sebaliknya, fenomena politik transaksionalisme dan pragmatisme politik berpusat modal (*capital centered democracy*) demikian dominan menentukan hasil pemilihan figur kepala daerah.

Kekhawatiran lahirnya praktek korupsi dan manipulasi kekuasaan dalam rentang perjalanan otonomi daerah berikut praktek politik di dalamnya melahirkan fakta dan realitas yang tidak bisa dipungkiri. Apa yang disebut desentralisasi korupsi di balik desentralisasi pemerintahan dalam paket kebijakan otonomi daerah mewarnai proses politik di dalamnya.²⁹ Desentralisasi korupsi di samping terdapat dalam agenda demokrasi, khususnya pemilukada langsung, juga dalam proses politik kebijakan publik. Praktek desentralisasi korupsi ini tampak dari manipulasi kekuasaan (*abuse of power*) yang melekat dalam otoritas struktural baik kepala daerah maupun anggota legislatif. Meski dua lembaga tersebut secara normatif punya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di balik otoritas serta fungsi dan peran strategis dalam mewujudkan visi pembangunan namun tidak selalu sesuai harapan masyarakat. Dengan kata lain, praktek korupsi dan manipulasi kekuasaan tidak bisa difahami secara struktural yang bersifat obyektif namun menuntut pemahaman kritis yang bersifat subyektif.

Beberapa kajian kritis tentang praktek korupsi dan manipulasi kekuasaan di tingkat daerah dalam kurun waktu sejak tahun 2001 merupakan fakta menarik yang perlu mendapat perhatian bersama. Hal ini didasarkan bahwa praktek korupsi dan manipulasi kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif bukan sekedar bersifat struktural berupa penyimpangan sistem dan mekanisme aturan yang jelas terdapat dalam Undang-undang. Lebih jauh, praktek korupsi dan manipulasi di atas memuat unsur dan dimensi subyektifitas berupa pergeseran-pergeseran ideologis dan teologis. Ideologi dalam konteks politik di Indonesia merupakan landasan utama yang terdapat di berbagai partai politik. Ideologi tersebut memperlihatkan pelembagaan sehingga menjadi struktur kognitif yang harus mendasari setiap aktor politik di dalam partai tersebut. Di dalam partai politik, ideologi harus menjadi landasan berfikir dan bertindak baik di ranah struktural pemerintahan maupun sosial dan kultural.

Di samping ideologis, dimensi teologis dalam kehidupan politik menduduki peran penting karena memuat seperangkat sistem keyakinan dan kepercayaan tentang

²⁹Budi Setiyono, "Korupsi Transisi Demokrasi dan Peran Organisasi Civil Society: Suatu Tinjauan Teoritis", *Jurnal Politika*, Vol. 1, No. 1, 2010, 5.

Tuhan yang menjadi landasan moral dan etis politik. Jika pelembagaan ideologi dapat dilakukan di ranah struktural dan institusional maka pelembagaan teologis hanya bisa dilakukan di ranah personal dan kultural. Hubungan antara dimensi ideologis dan teologis di atas demikian penting bagi praktek demokratis politik di Indonesia kontemporer. Hubungan antar keduanya bukan sekedar bersifat spekulatif namun berpijak dari landasan historis, sosiologis dan politis. Sebagaimana ditegaskan di atas bahwa dinamika demokratis politik dan ideologi tidak bisa mengabaikan posisi Islam dalam kehidupan politik nasional itu sendiri. Demikian pula, kemajuan kebijakan berupa desentralisasi pemerintahan serta dampak desentralisasi korupsi yang ditimbulkan tidak bisa dilepaskan dari kekuatan politik Islam di dalamnya.

Hal ini didasarkan bahwa politik Islam di Indonesia telah mengalami pencairan sedemikian rupa di mana kehadiran partai politik berasaskan Islam berikut perolehan kursi di lembaga legislatif, baik pusat maupun daerah, masih dominan. Di sisi lain, kemenangan beberapa partai nasionalis dan sekular tidak bisa mengabaikan bahwa figur-figur di dalam partai tersebut juga berlatarbelakang Islam. Fenomena pencairan Islam ke dalam politik di atas telah terjadi sejak zaman pemerintahan Sukarno yang masih bertahan hingga masa sekarang. Meski demikian, dominasi partai politik Islam dan politisi muslim di setiap partai politik yang secara otomatis mewujud di lembaga parlemen merupakan fenomena dan realitas menarik tentang bagaimana artikulasi nilai-nilai religius terjadi di dalamnya. Dengan kata lain, bagaimana posisi nilai-nilai Islam tersebut mendasari dan melandasi setiap figur politisi di lembaga parlemen, baik pusat maupun daerah, merupakan persoalan yang selalu relevan diangkat ke permukaan.

Meski demikian, di luar problem keharusan etis bagi politisi muslim dalam struktur kekuasaan juga masih terdapat problem teologis lain yang tidak bisa diabaikan. Politik kebijakan publik merupakan aspek penting dalam struktur dan institusi pemerintahan yang harus dijalankan oleh seluruh elit politik baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Politik kebijakan publik merupakan pemikiran dan aksi politik yang berpusat pada bagaimana membuat perencanaan pembangunan, baik nasional maupun daerah, yang sesuai dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Dalam sistem demokrasi liberal, seluruh agenda demokrasi baik pemilu maupun politik kebijakan publik harus berpijak pada prinsip-prinsip demokratis berupa partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. Partisipasi publik merupakan aspek penting bagi peningkatan kualitas demokrasi dengan jalan membuka ruang maksimal bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Upaya mewujudkan tingkat partisipasi tersebut bukan saja merupakan tanggung-jawab pemerintah, khususnya legislatif dan eksekutif, namun menuntut sikap responsif dan proaktif masyarakat untuk terlibat di dalamnya.

Partisipasi demokrasi dengan terlibat di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di atas tidak bisa dinilai bersifat formalistik dan proseduralistik. Sebaliknya, keterlibatan tersebut merupakan prasyarat utama dalam melakukan pengumpulan ideologis yang kerap kali muncul di dalam proses pembangunan nasional dan daerah. Pengumpulan ideologis tersebut merupakan upaya sekaligus langkah untuk mengetahui dan memahami sejauh mana realisasi anggaran pembangunan memberikan kontribusi konstruktif dan transformatif bagi kehidupan masyarakat. Sebaliknya, kelemahan pengumpulan melalui keterlibatan aktif dalam proses pembangunan dengan sendirinya menimbulkan dampak serius, yakni praktek korupsi dan manipulasi. Selain partisipasi, aspek transparansi juga demikian penting karena menyangkut hak-hak

publik untuk mengetahui sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan itu berjalan. Hak untuk mengetahui sejauh ini hanya dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang justru tidak bisa difahami masyarakat. Padahal di balik hak publik yang bersifat administratif, diperlukan penguatan dan pengembangan praktek komunikasi sebagai unsur utama dalam dimensi transparansi kebijakan tersebut. Demikian pula dengan dimensi akuntabilitas kebijakan juga memuat berbagai prinsip di atas.

Meski demikian, beberapa prinsip yang terkandung dalam hak-hak publik untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik, tuntutan transparansi dan akuntabilitas kebijakan di atas tidak selalu berjalan secara maksimal. Di samping itu, kelemahan publik untuk tetap konsisten dalam proses politik kebijakan di atas merupakan faktor utama. Namun munculnya kelemahan tersebut tidak selalu dilatarbelakangi faktor kultural di dalam masyarakat itu sendiri. Lebih jauh, rekayasa struktural yang dijalankan oleh elit politik berupa hegemoni lunak (*soft hegemony*) dan kekuasaan lunak (*soft power*) melalui praktek manipulasi nalar dan kesadaran berikut komodifikasi melalui politik pencitraan dengan memaksimalkan fungsi dan peran media massa. Manipulasi dan komodifikasi tersebut berupa narasi-narasi tentang keberhasilan pembangunan daerah yang sengaja dikonstruksi untuk memperoleh legitimasi politik publik. Beberapa langkah tersebut sengaja dilakukan elit politik, baik eksekutif maupun legislatif, untuk meruntuhkan kesadaran kritis masyarakat. Lebih jauh, beberapa langkah tersebut mencerminkan bahwa praktek liberalisme politik masih menyimpan selubung hegemoni kognitif di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengabaikan praktek diskursus ideal dalam ruang publik demokratis.

Keharusan etis dalam struktur dan budaya politik dalam era demokrasi liberal merupakan upaya kritis atas konstruksi teologis dan ideologis elit politik di lembaga pemerintahan di atas. Dengan kata lain, keharusan etis merupakan bentuk kontinuitas kesadaran teologis yang bersifat metafisik. Upaya kritis ke arah keharusan etis terhadap struktur pemerintahan atau kekuasaan di atas menjadi penting guna menghindarkan kesadaran teologis yang metafisik dari berbagai bentuk simbolitas dan simbolisasi yang berpijak dari rasionalitas instrumental dalam praktek liberalisme politik kontemporer. Fenomena ini tampak dari bagaimana Islam merupakan bagian sekaligus sumber dan sarana komodifikasi politik elit demi memperkuat agenda manipulasi kognitif di atas. Hal ini didasarkan bahwa secara sosiologis dan psikologis, konstruksi manipulasi kognitif melalui komodifikasi agama berikut perangkat hegemoni lain menimbulkan impresi politik positif dari masyarakat untuk menutup berbagai problem korupsi politik kebijakan publik.

Kemajuan gejala korupsi dan manipulasi kekuasaan dengan memainkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bagi agenda pencitraan politik melalui komodifikasi dan manipulasi kognitif serta melibatkan berbagai perangkat ideologis menuntut kontekstualisasi teologi pembebasan secara luas. Fenomena ini berbeda dengan masa sebelumnya di mana keharusan teologi pembebasan yang berpijak dari paradigma Marxis dan Neomarxis menitikberatkan agenda perubahan revolusioner baik secara politik maupun ekonomi. Dalam Islam, kehadiran teologi pembebasan melalui integrasi paradigma Marxis dan Neomarxis dengan nilai-nilai historis dalam Islam menuntut kontekstualisasi secara luas. Hal ini didasarkan bahwa kontekstualisasi teologis pembebasan tersebut dihadapkan pada kompleksitas persoalan yang tidak sekedar berangkat dari doktrin dan ajaran normatif namun juga etis. Keharusan etis

dalam teologi pembebasan di atas merupakan suatu pendekatan afirmatif kritis yang di samping bersifat obyektif juga subyektif.

C. Konstruksi Etika Kritis dan Liberatif

Kemajuan neoliberalisme kontemporer dalam kehidupan politik dan ekonomi memposisikan logika ekonomi sebagai landasan pemikiran dan perilaku politik. Fenomena degradasi konsep-konsep politik ideal diakibatkan oleh kemajuan logika ekonomi kapitalistik dan liberalistik yang menyelubung ke dalam nalar dan kesadaran politik. Demikian pula, dimensi moral dan etis yang diwariskan oleh nilai-nilai filosofis klasik berikut agama tidak lagi menjadi pertimbangan fundamental perilaku politik namun justru berbalik sebagai landasan rasionalitas instrumental bagi pencapaian logika ekonomi di dalam politik. Fenomena korupsi dan manipulasi kekuasaan di balik kebijakan desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah memperlihatkan penjungkir-balikan ideologis dan teologis yang memuat konsep-konsep ideal berubah menjadi materi komodifikasi politik demi menaikkan elektabilitas melalui agenda pencitraan.

Upaya memposisikan dimensi etika sebagai esensi dan substansi teologi kontemporer dan kontekstual, khususnya di dalam teologi pembebasan masih memperlihatkan relevansi. Sejauh ini, munculnya paradigma teologi politik khususnya dari tradisi Kristen juga memposisikan etika sebagai esensi utama. Sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa teologi, khususnya dalam Islam, sudah waktunya memperkuat garis horisontal dengan jalan terlibat aktif dalam kehidupan empiris masyarakat muslim. Penguatan garis horisontal merupakan bentuk kesadaran etis dari proses vertikal yang bercorak transendental. Dengan kata lain, dimensi vertikal dan horisontal harus memperlihatkan keseimbangan ideal sebagaimana tampak tegas dalam doktrin dan ajaran Islam.

Kesadaran etis dan moral di dalam kehidupan politik tidak hanya dikenal sebagai wujud etika politik konvensional. Kesadaran etis dan moral dalam politik harus memuat unsur atau dimensi pembebasan. Hal ini didasarkan bahwa etika dan moralitas politik yang hanya berhenti dalam struktur nalar dan kesadaran tidak lebih sebagai doktrin dan dogma beku tanpa daya potensial untuk menyelesaikan problem-problem eksternal. Di Indonesia, konstruksi etika dan moralitas politik tersebut sudah melembaga sedemikian rupa yang ditunjang dengan berbagai simbolitas agama berikut agen-agen moral yang secara terus-menerus melakukan agenda indoktrinasi. Namun demikian, konstruksi moral dan etika tersebut tidak lebih sebagai nalar dan kesadaran murni yang rawan berpotensi menjadi komoditas dalam praktek komodifikasi politik dalam ruang publik.

Dalam teologi pembebasan, etika dan moralitas politik merupakan unsur penting yang tidak sekedar menyangkut dimensi kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan, sebagaimana definisi dan konsepsi etika formal dan konvensional. Dalam teologi pembebasan, etika harus berwajah kritis sebagai syarat utama dan pertama lahirnya etika liberatif. Dengan kata lain, dimensi etika dan moral dalam teologi pembebasan harus memperlihatkan konvergensi kritis menyangkut konsep-konsep pembebasan di dalamnya. Sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa dimensi kritis dalam teologi pembebasan baik dalam tradisi Kristen maupun Islam berpijak dari pandangan Marxisme maupun Neomarxisme. Pijakan atau landasan tersebut tetap diperlukan namun menuntut integrasi dengan dimensi moral dan etis yang direproduksi dari nilai-nilai Islam. Dari sini tampak bahwa upaya menegakan etika dan moralitas

politik yang sejalan dengan nilai Islam harus dimulai dengan pendekatan kritis baik dari Marx maupun mazhab kritis lainnya.

Keharusan paradigma etika kritis dan liberatif (*liberative and critical ethics*) sebagai unsur fundamental teologi pembebasan dalam Islam di bidang politik yang dimanifestasikan institusi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif dapat dikonstruksi sebagai berikut. *Pertama*, rekonstruksi etika Islam yang bercorak kritis dan liberatif. Rekonstruksi ini dilatarbelakangi bahwa doktrin dan ajaran Islam sejauh ini masih bercorak normatif daripada kritis. Doktrin dan ajaran normatif ini masih mendominasi pemahaman Islam sebagian besar politisi muslim sehingga hanya melahirkan konstruksi nalar dan kesadaran Islam sebatas ritual dan spiritual melalui praktek verbalisme politik dalam struktur kekuasaan. Dalam era demokrasi liberal, verbalisme doktrin dan ajaran Islam di atas direduksi secara fungsional sebagai agenda pencitraan guna memperkuat legitimasi politik masyarakat. Rekonstruksi etika Islam melalui perspektif kritis dan liberatif di atas berpijak dari paradigma filsafat kritis baik dalam tradisi pemikiran Islam kontemporer maupun Barat. Agenda rekonstruksi tersebut secara otomatis mengarah pada sumber doktrin dan ajaran Islam utama, yakni al-Qur`an dan Sunnah.

Kedua, integrasi etika kritis dan liberatif ke dalam pemikiran politik Islam. Dominasi pemikiran politik Islam yang bercorak historis dan normatif sejauh ini merupakan tantangan utama karena melahirkan cara berfikir romantis, ideologis dan pragmatis. Pandangan romantis atas sejarah politik Islam merupakan fenomena yang masih tampak ke permukaan akibat pengalaman historis-intelektual sebagian politisi muslim. Padahal pandangan tersebut di samping tidak realistik dan tidak relevan juga tidak realistik di tengah arus liberalisme politik pragmatis yang menuntut keharusan perubahan secara reformis maupun revolusioner. Sikap romantis yang diperkuat dengan tidak realistik juga melahirkan konstruksi ideologi fundamentalis dan radikal. Fenomena ini tampak di Indonesia dengan lahirnya berbagai gerakan Islam fundamentalis sebagai bentuk perlawanan buta atas realitas demokratis bercorak liberalistik.

Ketiga, penetrasi paradigma etika kritis dan liberatif ke dalam agenda pendidikan politik masyarakat (*civic education*). Etika kritis dan liberatif sebagai unsur utama teologi pembebasan dituntut menjadi landasan pendidikan politik baik secara struktural maupun kultural. Di arena struktural, lembaga-lembaga demokrasi dapat berperan penting dalam mengembangkan paradigma tersebut secara efektif. Hal ini didasarkan bahwa praktel liberalisme politik bercorak pragmatis, instrumental dan bahkan manipulatif dan koruptif terdapat dalam struktur kekuasaan. Penetrasi paradigma kritis di atas tidak bisa dilakukan secara fragmentatif namun integratif. Rekonstruksi kesadaran etis dari nilai-nilai Islam yang bersumber dari doktrin dan ajaran Islam di atas menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Di wilayah kultural, partai politik dan organisasi-organisasi lain yang terkait juga berperan penting dalam memaksimalkan jangkauan pendidikan politik masyarakat.

Paradigma etika kritis dan liberatif yang secara sekilas ditegaskan di atas menuntut dan bahkan mengharuskan dialektika antara Islam dengan paradigma keilmuan kontemporer. Etika Islam yang berpijak dari dua sumber doktrin dan ajaran Islam, yakni al-Qur`an dan Sunnah, tidak bisa difahami hanya menggunakan perspektif dan pendekatan klasik bercorak normatifitas dan historisitas. Lebih jauh, diperlukan perspektif dan pendekatan yang berpijak dari paradigma kontemporer khususnya teori-

teori kritis baik dalam filsafat maupun ilmu sosial dan politik. Teologi pembebasan dalam Islam yang ditegaskan di atas merupakan bentuk perkembangan pemikiran Islam yang telah bersinggungan dengan paradigma kritis tersebut. Etika kritis dan liberatif dalam teologi pembebasan di bidang politik sebagaimana ditawarkan kajian ini juga memerlukan paradigma kritis guna memperkuat tradisi pemikiran Islam di sebagian besar masyarakat muslim, khususnya di dalam struktur kekuasaan, yang masih bercorak normatif dan historis.

D. Agenda Praksis dan Emansipatoris

Etika kritis dan liberatif dalam paradigma teologi pembebasan khususnya di bidang politik secara luas menuntut lahirnya konstruksi nalar dan kesadaran baik teologis maupun ideologis yang seimbang. Konstruksi nalar dan kesadaran baik teologis maupun ideologis tersebut harus mendasari dan melandasi pemikiran dan praktek politik baik secara struktural maupun sosial dan kultural. Tantangan neoliberalisme politik dan ekonomi kontemporer sejauh ini masih terkonsentrasi dalam ranah struktural meski tidak memungkiri telah menyebar ke berbagai ranah sosial dan kultural. Hal ini didasarkan bahwa hubungan antara rakyat dan negara dalam sistem demokrasi Indonesia masih memosisikan negara sebagai kekuatan dengan ragam kemungkinan hegemonik dan dominatif terhadap rakyat. Pergeseran ke arah dominasi dan hegemoni merupakan fenomena yang sengaja dikonstruksi oleh praktek neoliberalisme politik dan ekonomi di atas.

Teologi pembebasan dengan pijakan etika kritis dan liberatif berkonsentrasi pada upaya mewujudkan etika praksis dan emansipatoris dalam kehidupan politik itu sendiri. Etika praksis dan emansipatoris merupakan manifestasi dari teologi pembebasan yang diperkuat dengan paradigma kritis baik filsafat maupun Ilmu-ilmu sosial di samping keagamaan (Islam). Etika kritis dan liberatif dalam struktur kekuasaan menuntut jangkauan ke arah kebijakan publik sebagai aspek fundamental bagi proses perubahan sosial. Intervensi etika kritis ke ranah kebijakan publik dengan sendirinya berorientasi liberatif, yakni pembebasan masyarakat dari berbagai persoalan struktural maupun kultural, misalnya kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan sebagainya. Etika kritis bercorak praksis-emansipatoris tidak lagi berpijak dari asumsi tentang benar dan salah atau baik dan buruk sebagaimana dalam etika klasik, namun memuat prinsip dan nilai kritis dan liberatif meski secara implisit tetap berpijak dari makna baik dan buruk serta benar dan salah. Hal ini didasarkan bahwa pengabaian makna dasar etika tersebut justru berdampak pada nihilitas dan bahkan absurditas. Dengan kata lain, apa tujuan etika kritis dan liberatif jika masih terjebak ke dalam rangkaian korupsi dan manipulasi kebijakan publik akibat pengabaian makna dasar etika di atas.

Manifestasi etika kritis dan liberatif secara praksis dan emansipatoris dalam kebijakan publik harus dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan. Meski kebijakan desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah memperlihatkan kelemahan fundamental berupa korupsi dan manipulasi kekuasaan namun juga memperlihatkan berbagai inovasi yang sejalan dengan nilai-nilai substantif demokrasi. Manifestasi etika kritis dan liberatif dalam konteks kebijakan publik menuntut visi dan praktek demokratis yang partisipatif, transparan dan obyektif. Hal ini didasarkan bahwa demokrasi secara sederhana memberikan ruang dan kesempatan terhadap warga negara secara egaliter dalam praktek diskursus dalam ruang publik demokratis. Prinsip egalitarianisme ini dalam perspektif etika kritis menjadi penting

sebab interaksi dan komunikasi antar warga dapat berjalan secara obyektif tanpa hambatan berupa kesenjangan sosial dan kultural. Prinsip egalitarianisme ini membuka ruang bagi setiap individu melakukan praktek diskursus secara transparan di mana masing-masing pihak dapat secara jujur dan obyektif membuka diri guna membangun komitmen kolektif dan etis dalam proses kebijakan di atas.

Prinsip lain dalam perwujudan etika kritis dan liberatif adalah melandasi orientasi kebijakan publik yang bercorak populis. Hal ini didasarkan bahwa meski seluruh kebijakan pembangunan adalah dari dan untuk publik sebagai semangat demokratis namun masih memperlihatkan fenomena budaya pragmatis, instrumental, koruptif dan manipulatif. Beberapa budaya tersebut menimbulkan pengabaian akan hak-hak publik dalam program kebijakan pembangunan. Beberapa budaya tersebut juga mendasari sebagian elit politik untuk menyusun program pembangunan yang meski seolah populis namun sesungguhnya memuat selubung korupsi dan manipulasi. Dalam teologi pembebasan, etika kritis dan liberatif berorientasi kebijakan populis menuntut pemahaman obyektif tentang kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Pemahaman obyektif tentang kebutuhan masyarakat (*social needs*) di samping deskriptif juga kritis. Pendekatan skala prioritas (*priority scale*) dalam terminologi pembangunan nasional dewasa ini menjadi aspek penting bagi kebijakan populis.

Meski demikian, konsep skala prioritas harus berpijak dari pendekatan multi-perspektif sehingga tidak terjebak ke dalam permainan angka-angka statistik. Dengan kebijakan populis yang berpijak dari pendekatan skala prioritas melalui perspektif yang luas maka melahirkan apa yang disebut prinsip liberatif. Prinsip liberatif dalam teologi pembebasan tidak sekedar bersifat karitatif, namun juga inovatif berupa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berangkat dari kondisi empiris yang meruanglingkupi. Prinsip liberatif dalam politik kebijakan publik berorientasi pada pengentasan maksimal dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan serta dari praktek dominasi, hegemoni dan eksploitasi struktural dan kultural. Dengan prinsip liberatif di atas maka terjadi proses transendensi bahwa Islam tidak sekedar agama ritual dan spiritual namun memuat tanggung-jawab kemanusiaan atas berbagai problem yang meruanglingkupi ummatnya.

Kesimpulan

Konstruksi teologi pembebasan melalui perspektif etika kritis dan liberatif berangkat dari keniscayaan teologis kontemporer itu sendiri, yakni membangun keseimbangan antara dimensi vertikal-transendental bercorak metafisik dengan dimensi horisontal-imanen bercorak etis. Keniscayaan teologis di atas dengan sendirinya memuat dialektika antara teks dengan konteks. Dialektika tersebut melingkupi arena struktural dan sosial-kultural. Meski kehadiran kapitalisme dan liberalisme melalui pendekatan demokrasi liberal memperlihatkan ancaman dominasi, hegemoni dan eksploitasi, namun terdapat peluang-peluang bagi visi dan misi pembebasan melalui pendekatan etika kritis dan liberatif di atas. Manifestasi etika kritis dan liberatif di ranah struktural diwujudkan ke berbagai sektor, khususnya kebijakan publik. Hal ini didasarkan bahwa kebijakan publik berupa program pembangunan merupakan unsur paling liberatif atas berbagai problem masyarakat kontemporer. Namun manifestasi tersebut harus diperluas dengan jalan pengarus-utamaan melalui program pendidikan politik yang di dalamnya, teologi pembebasan khususnya etika kritis dan liberatif

menjadi materi penting. Pendidikan politik dengan memuat materi tersebut dilakukan secara struktural maupun sosial dan kultural.

Daftar Pustaka

- Ali Engineer, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung P. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Ali Engineer, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Anwar, M. Syafii, *Pemikiran dan Aksi islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara* (Bandung: Mizan, 2002).
- Bell, Daniel, *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in Fifties* (New York: The Free Press, 1960).
- Campanini, Massimo, *The Qur`an: The Basics* (London and New York: Routledge, 2016).
- Drewes B.F., dan Julianus Mojau, *Apa Itu Teologi?: Pengantar Ke Dalam Ilmu Teologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007).
- Eatwell, Roger, "Ideologies: Approaches and Trends" dalam Roger Eatwell dan Anthony Wright, *Contemporary Political Ideologies* (London: Pinter Publishers, 1994).
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2007).
- Fukuyama Francis, "The End of History", dalam *The National Interest*, Vol. 16, 1989.
- Fukuyama, Francis, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, terj. M. Husein Amrullah (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 1992).
- Fitzgerald, Timothy, *The Ideology of Religious Studies* (New York: Oxford University Press, 2000). McEfee Brown, *Gustavo Guterrez: An Introduction to Liberation Theology* (New York: Orbis Books, 1990).
- Guterrez, Gustavo, *A Theology of Liberation: History, Politics and Salvation* (New York: Orbis Books, 1988).
- Hardiman, F. Budi, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Menurut Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Haryono, Anwar, *Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).
- Hadiz, Vedi R., *Localizing Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* (Stanford: Stanford University Press, 2010).
- Huntington, Samuel P., *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. ter. Sadat Ismail (Jakarta: Qalam, 2001).
- Iswahyudi, Nalar Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer," dalam Wasid,dkk, *Menafsirkan Tradisi dan Modernitas: Ide-ide Pembaruan Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2011).
- Kristol, Irving, ed, *Memotret Kanan Baru* Terj. Wahyudin. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001).

- Khan, Qomaruddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*. terj. Anas M (Bandung: Pustaka, 1983).
- Levine David, dan James A. Caporaso, *Teori-teori Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Macpherson, C.B., *The Life and Times Liberal Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 1979).
- Martua PB, *Hedonisme Arus Balik Demokrasi* (Jakarta: PWI, 2015).
- Maschan Moesa, Ali, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2008). Muhammad Iqbal, "Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam di Nusantara", dalam *Jurnal Islamica*, No. 1. Vol. 6. 2011.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam: Sejarah, Aliran-aliran dan Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 2006).
- Perdana, Aditya, "Civil Society dan Partai Politik dalam Demokratisasi di Indonesia", Makalah pada Seminar Internasional ke-10 oleh Yayasan Percik-Salatiga pada 30 Juli 2009.
- Schwarzmantel, John, *Ideology and Politics* (London: Sage Publications, 2008).
- Shaleh, Hashem, "Metode Kritik Akal Islam: Wawancara Dengan Muhammad Arkoun", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, tahun 1994.
- Sugeng Hadiwinata, Bob, "Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 1. Vol. 9. Tahun 2005.
- Setiyono, Budi, "Korupsi Transisi Demokrasi dan Peran Organisasi Civil Society: Suatu Tinjauan Teoritis", *Jurnal Politika*, Vol. 1, No. 1, 2010.
- Turner, Bryan S., ed, *The Routledge Handbook of Globalization Studies* (New York: Routledge, 2010).
- Tibi, Bassam, *Islam dan Islamisme* (Bandung: Mizan, 2016).
- Yanaras, Christos, "A Note on Political Theology", dalam *St Vladimir's Theology Quarterly*, No. 27. Vol. 1, 1983.